



Gubernur Kumpulkan Pimpinan SKPD Serapan Anggaran 89,55 Persen

DENPASAR, NusaBali

Gubernur Made Mangku Pastika mengumpulkan pimpinan SKPD Pemprov Bali di Ruang Praja Sabha Kantor Gubernur, Jumat (27/11). Dalam pengarahannya, Pastika menekankan pentingnya optimalisasi kinerja terkait akan berakhirnya tahun anggaran 2015. Beberapa hal yang mendapat perhatian Pastika antara lain tindak lanjut rekomendasi BPK, serapan anggaran, dan RAPBD 2016.

Terkait dengan tindak lanjut rekomendasi BPK, Inspektur Provinsi Bali Drs I Ketut Teneng SP MSi menjelaskan bahwa hampir seluruh rekomendasi lembaga pemeriksa telah ditindaklanjuti. Bahkan, Pemprov Bali berhasil meraih penghargaan Irjen Kemendagri karena tuntas menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan lembaga tersebut.

Terkait daya serap anggaran, Plt.Karo Keuangan Pemprov Bali Dewa Putu Sunarta menerangkan, hingga akhir Nopember, dana yang terserap mencapai 89,55 persen.

Sedangkan Kepala Bappeda Putu Astawa memaparkan postur APBD 2016 yang dirancang sebesar Rp 5,149 triliun. Alokasi dana tersebut sebagian besar akan dimanfaatkan untuk membiayai program pro rakyat seperti bedah rumah, Simantri, Gerbangsadu, dan infrastruktur.

"Kita merencanakan 1.500 unit bedah rumah, 15 Gerbangsadu, dan 100 unit Simantri," urainya. Anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur mencapai Rp 221 miliar.

Pastika mengapresiasi paparan yang disampaikan jajarannya. Tetapi dia berharap agar waktu yang tersisa di tahun anggaran 2015 dapat dimanfaatkan lebih efektif untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pastika kembali mengingatkan netralitas jajarannya pada pelaksanaan pilkada serentak, 9 Desember mendatang. Meski netral, pejabat dan PNS tetap punya kewajiban untuk turut menjaga kondusifitas di lingkungan masing-masing. "Tetap harus ikut memonitor dan peduli terhadap lingkungan," imbuh Pastika yang didampingi Wagub Ketut Sudikerta dan Sekprov Cok.Pemayun. Ancaman terorisme, narkoba, dan revolusi mental juga menjadi penekanan Pastika dalam pengarahannya. **nat**

Edisi : Sabtu, 28 Nov 2015

Hal : 3



Ketua DPRD Bali Suarakan Pencairan Bansos Lewat Pantun

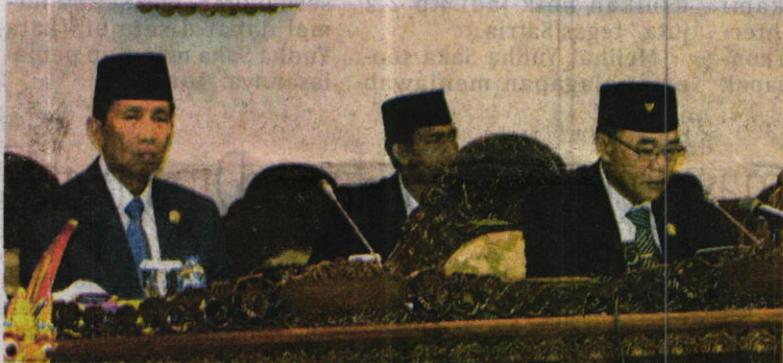
★ Gubernur Ingatkan Implikasi Hukum

DENPASAR, NusaBali

DPRD Bali selaku fasilitator dana bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat, berharap penuh kepada Gubernur Made Mangku Pastika supaya hibah tersebut bisa direalisasikan jelang tutup tahun 2015. Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama sampai menyentil eksekutif dengan pantun atas masih lambannya proses pencairan bansos ini.

Sentilan berupa pantun itu disampaikan Adi Wiryatama saat pelantikan anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Karangasem dengan status Pengganti Antar Waktu (PAW), Nyoman Oka Antara, dalam Sidang Paripurna Istimewa di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Jumat (27/11) siang. Acara pelantikan Oka Antara yang

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1



Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama (kanan) dan Gubernur Pastika saat Sidang Paripurna Istimewa di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Jumat (27/11).

hal 1

Edisi : Sabtu, 28 NOV 2015

Hal : 1



Ketua DPRD Bali Suarakan Pencairan Bansos Lewat Pantun

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

menggantikan Ni Made Sumiati kemarin, kebetulan dihadiri Gubernur Pastika, serta para Kepala SKPD lingkup Pemprov Bali, selain Pimpinan Dewan.

Nah, usai proses pengambilan sumpah jabatan Oka Antara, Adi Wiryatama selaku Ketua DPRD Bali menutup Sidang Paripurna Istimewa dengan pidato spesial. Saat pidato inilah, Adi Wiryatama mengeluarkan jurus pantun terkait dengan pencairan dana bansos yang masih terkatung-katung.

"Beli nasi bubur pakai selada ke Kota Gede, anak kos memancing di Pelabuhan Ratu. Terimakasih Pak Gubernur, Pak Sekda, dan SKPD, dana bansos kabarnya baru cair walaupun hanya satu," ujar politisi senior PDIP yang mantan Bupati Tabanan dua periode (2000-2005

dan 2005-2010) ini dalam pantunnya yang disambut tepuk riuh anggota Dewan lainnya. Adi Wiryatama masih melanjutkan pantunnya. "Burung onta sayapnya lebar. Anggota harap bersabar," imbuh mantan Sekretaris DPD PDIP Bali ini.

Seusai Sidang Paripurna Istimewa kemarin siang, Adi Wiryatama menyebutkan pantun yang dilontarkan berkaitan dengan bansos tersebut adalah bahasa diplomasi sebagai seorang pejabat legislatif dan selaku wakil rakyat yang memperjuangkan nasib dan hak mereka. "Tidak ada tujuan apa pun. Tapi, harus diingat, rakyat sangat menunggu dana hibah dan bansos bisa segera cair. Pantun itu saya sampaikan supaya menggugah eksekutif, ya jangan lama-lama-lah," dalih politisi asal kawasan sejuk Banjar Teguh, Desa Angseri, Kecamatan

Baturiti, Tabanan ini.

Adi Wiryatama menyebutkan, dari aturan dan proses, semuanya tidak ada masalah. Sebab, DPRD Bali sudah berkoordinasi dengan pusat dan eksekutif (Pemprov Bali), juga tidak ada persoalan. "Dari sisi aturan, sudah tidak ada masalah. Kasihan rakyat lama menunggu," katanya.

Sementara itu, dikonfirmasi sesuai Sidang Paripurna Istimewa pelantikan Oka Antara dengan status PAW di Gedung Dewan, Jumat kemarin, Gubernur Pastika enggan menanggapi pantun yang bernada menyentil eksekutif karena dana bansos telat cair ini. "Ya, kita harus ikuti aturan dan mekanisme. Tidak grasa-grusu-lah. Kita nggak mau ada masalah, itu saja," ujar Pastika.

Pastika mengatakan, Biro Keuangan Setda Provinsi Bali

selaku leading sector pencairan dana bansos, harus hati-hati juga. "Bolak-balik prosesnya, tak masalah, yang penting benar. Ini urusannya dengan hukum. Harus hati-hati itu. Karena kalau salah, yang mencairkan bisa kena dan anggota Dewan juga bisa kena mereka," tegas mantan Kapolda Bali ini.

Pastika menegaskan, kalau terjadi pelanggaran hukum dan ada penyimpangan, maka yang paling pertama kena adalah Gubernur selaku pihak yang menandatangani Pergub, lalu Sekda yang menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), serta Kepala Biro yang mencairkan anggaran hibah. "Ya, sabarlah. Tunggu prosesnya, supaya tidak terjadi masalah," tandas Pastika yang kemarin didampingi Kepala Inspektorat Provinsi Bali, Ketut Teneng. 

hal 2

Edisi : Sabtu, 28 NOV 2017

Hal : 15